

**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
*AUDIT REPORT LAG***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

ARMANIA PUTRI WARDHANI
NIM. C2C009161

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Armania Putri Wardhani

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009161

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP *AUDIT REPORT*
*LAG***

Dosen Pembimbing : Surya Raharja, S.E, M.Si, Akt.

Semarang, 11 April 2013

Dosen Pembimbing,

(Surya Raharja, S.E, M.Si, Akt)

NIP 197605252006041002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Armania Putri Wardhani

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009161

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP *AUDIT REPORT
LAG***

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 29 April 2013

Tim Penguji

1. Surya Raharja, S.E, M.Si, Akt. ()
2. Puji Harto, S.E, M.Si, Akt, Ph.D ()
3. Wahyu Meiranto, S.E, M.Si, Akt. ()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Armania Putri Wardhani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Audit Report Lag***, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 11 April 2013
Yang membuat pernyataan,

Armania Putri Wardhani
NIM. C2C009161

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of the size of the audit committee, audit committee independence, audit committee meeting, Competence Audit Committee Member, Board Size, and Independent Commissioner of the audit report lag on all the companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010-2011.

This study is an empirical study with purposive sampling technique in data collection. Secondary data obtained from the financial annual report of 418 companies listed on the Stock Exchange in 2010-2011. Data analysis was performed by multiple regression.

The results of hypothesis testing indicated that audit committee independence, competency audit committee members and board size significantly influence the audit report lag. Furthermore, the size of the committee, audit committee meeting, the Independent Commissioner no significant effect on audit report lag.

Keywords: Audit Report Lag, Corporate Governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran komite audit, Independensi Komite Audit, Rapat komite audit, Kompetensi Anggota Komite Audit, Ukuran Dewan, dan Komisaris Independen terhadap *audit report lag* pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2010-2011.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik *purposive sampling* dalam pengumpulan data. Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan 418 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011. Analisis data dilakukan dengan regresi berganda.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa independensi komite audit, kompetensi anggota komite audit dan ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Selanjutnya ukuran komite, Rapat komite audit, Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Kata kunci: *Audit Report Lag, Corporate Governance*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Penolong.

(QS. 'Āli 'Imrān: 150)

Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidupku, dan Matiku hanyalah karena Allah,

Tuhan semesta alam

(Penggalan Doa Iftitah)

Semangat adalah wujud syukur paling sederhana kepada Allah

(Wardhani, 2009)

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

- Allah S.W.T sang Pemberi Kesempatan, sehingga saya dapat diterima di Akuntansi UNDIP
- Babe Iman, Bunda Anie, dan Uni Niar atas segala support, doa dan semangat
- Teman-teman dan berbagai pihak yang telah banyak membantu tersusunnya skripsi ini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, puji syukur penulis panjatkan atas rahmat, taufiq, dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Audit Report Lag*. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Nasir, M.Si., Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
3. Bapak Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt. selaku dosen wali penulis yang telah sabar memberi arahan dan nasihat selama ini
4. Bapak Surya Raharja, S.E, M.Si, Akt. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan serta konsultasi sehingga skripsi ini dapat selesai
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi

6. Ayahku Iman Sabar Soetopo, Bundaku Arsiani Sulaksmiwati, serta Kakakku Imaniar Putri Nastiti tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan. Terima kasih atas kesabarannya selama ini
7. Sahabatku dari kecil Alvius Aries Ahmad, Visita Putri, Bagus Lubiarto yang selalu ada dalam suka dan duka.
8. Dewi Fatmawati, Fauziah Nurul, Nora Marina, Fitriana Ratnasari, Mayco Defrio, Taufik Puspita, Edwardus Randy yang sudah berjuang bersama dari awal dan membuatku seperti mendapat keluarga baru. Banyak kenangan dan pelajaran berharga tak terlupakan bersama kalian selama ini. Terima kasih telah menemani di kala suka dan duka.
9. Andreas Widhi Khurniaji teman satu bimbingan yang sabar menjadi teman diskusi serta motivator dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ditia Ayu, Inna Rachma, Silvia Paramita, Ayu Fitaria, Monica Handoko, Angie Noor, Sigit Dwi, Anindyarta, Dominikus, Ema Diandra, Ivan herdyanto, Adhitya rachmadan, Ridho Alief yang sudah membuat kegiatan makan siang di kantin lebih seru, dan selalu memiliki *stock* candaan yang tidak pernah habis.
11. Teman-teman Akuntansi Undip 2009. Terima kasih telah memperkenalkanku arti perjuangan, dan persaingan sehat. Semoga kalian semua sukses dunia-akherat.
12. Eko, Thea, Nabila, Ulung, Rahadhiyan, Sonya, Rizal, Yudha, Nova, Santi Keluarga KKN Desa Dringo Batang, yang telah menemani penulis berjuang saat penyelesaian tabulasi.

13. Mas Rayo dan Mas Tatas terimakasih atas doa, dukungan serta diskusi seru diselingi curhat colongan dengan penulis.
14. Teman-teman dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 2 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Agensi	12
2.1.2 <i>Corporate Governance</i>	13
2.1.2.1 Komite Audit	15
2.1.3 Ukuran Dewan.....	21
2.1.4 Komisaris Independen	21
2.1.5 Laporan Keuangan	24
2.1.6 Audit dan Standar Auditing.....	26
2.1.7 <i>Audit Report Lag</i>	30

2.2 Penelitian terdahulu	31
2.3 Model Penelitian	36
2.4 Pengembangan Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
3.1.1 Variabel Dependen	43
3.1.2 Variabel Independen	43
3.1.3 Variabel Kontrol	46
3.2 Populasi dan Sampel	47
3.3 Jenis dan Sumber Data	48
3.4 Metode Pengumpulan Data	48
3.5 Metode Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	54
4.2 Analisis Data	55
4.3 Interpretasi	66
4.3.1 Hipotesis 1	66
4.3.2 Hipotesis 2	67
4.3.3 Hipotesis 3	67
4.3.4 Hipotesis 4	68
4.3.5 Hipotesis 5	69
4.3.6 Hipotesis 6	70
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Keterbatasan	74
5.3 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	34
Tabel 4.1 Hasil Pemilihan Sampel	54
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif 2	56
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif 3	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedosis.....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F	63
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t	64

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Model Penelitian	37
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan	80
Lampiran B Hasil Output SPSS	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan perusahaan dibuat dengan tujuan memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan para pengguna laporan keuangan dapat menilai informasi yang disajikan sebagai dasar membuat keputusan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Dalam Laporan Keuangan terdapat ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran-ukuran normatif dalam laporan keuangan sering disebut juga dengan Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Kieso *et al* (2011) Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari :

- a. Laporan keuangan harus relevan, artinya laporan keuangan harus menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- b. Laporan keuangan harus dapat dimengerti oleh para pemakainya. Oleh karena itu laporan keuangan harus dinyatakan dalam bentuk istilah-istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakainya.
- c. Laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh penguji yang independen dan objektif dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

- d. Laporan keuangan harus netral, dalam arti tidak disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak tertentu, melainkan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum pemakai informasi.
- e. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan dapat ditetapkan sedini mungkin.
- f. Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode sebelumnya.
- g. Laporan keuangan harus lengkap, dalam arti menyajikan informasi keuangan yang memadai sesuai dengan yang diperlukan oleh pemakainya.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan. Apabila laporan keuangan tidak disajikan tepat waktu maka laporan keuangan tersebut akan kehilangan nilai informasi, karena tidak tersedia saat pemakai laporan keuangan membutuhkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam PSAK No.1 Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43, jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Dyer dan McHugh (1975) dalam Rachmawati (2007), menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan. Di samping hal tersebut, ketepatwaktuan (*timeliness*) penyajian laporan keuangan akan memberikan andil bagi kinerja yang efisien di pasar saham yaitu sebagai fungsi evaluasi dan *pricing*, mengurangi tingkat *insider trading* dan

kebocoran serta rumor-rumor di pasar saham (Owusu dan Ansah 2000 dalam Rachmawati, 2007).

Selain itu menurut Kartika (2009), semakin singkat jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal penyampaian laporan keuangan, maka akan semakin banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan tersebut. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila laporan tersebut disajikan secara tepat waktu dan akurat. Hal ini menunjukkan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan ke publik sangat dibutuhkan dan oleh karena itu tiap-tiap perusahaan diharapkan tidak melakukan penundaan dalam penyajian laporan keuangan.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan. Prosedur ini mengatur hal-hal seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan (IAI, 2001 dalam Wijaya, 2012).

Namun demikian, Berdasarkan peraturan Bapepam No. X.K.2, lampiran keputusan ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Bapepam mewajibkan setiap perusahaan public yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan auditor independen kepada

Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan, dari peraturan Bapepam tersebut membuat manajemen harus memikirkan strategi agar dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, karena audit atas laporan keuangan merupakan aktivitas yang memerlukan waktu cukup lama. Menurut Masithoh (2011) dalam Wijaya (2012), proses audit cukup membutuhkan waktu, bahkan jika perlu auditor dapat memperpanjang masa audit agar informasi keuangan yang disampaikan akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Manajemen perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan keuangan tepat waktu dan ketentuan informasi yang andal. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevan dan keandalan kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan (IAI, 2001 dalam Wijaya, 2012).

Dyer dan McHugh, 1974 (dalam Wijaya, 2012) menyimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Pemakai Informasi tidak hanya membutuhkan informasi keuangan yang relevan sebagai prediksi pengambilan keputusan, namun juga memerlukan Informasi yang bersifat baru. Adanya ketepatan waktu memeberikan implikasi bahwa laporan keuangan sebaiknya disajikan dalam interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi serta keputusan.

Jumlah hari dari akhir tahun tutup buku sampai dengan laporan audit dikeluarkan dalam auditing disebut *audit report lag*. Semakin lama *audit report lag* maka semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya. *Lag* audit adalah penentu paling penting dari ketepatan waktu dalam pengumuman laba, dan

pada akhirnya akan menentukan reaksi pasar terhadap pengumuman laba. Menurut Naimi (2010), panjang-pendeknya *audit report lag* yang terjadi mempengaruhi pengambilan keputusan investor, karena dengan adanya penundaan informasi kepada investor dapat mempengaruhi kepercayaan investor di pasar modal. Givoly dan Palmon (1982) menegaskan bahwa lag audit merupakan penentu paling penting dari ketepatan waktu dalam pengumuman laba, yang pada saatnya akan menentukan reaksi pasar terhadap pengumuman laba. Knechel dan Payne (2001) menunjukkan bahwa “*Report Lag*” diperkirakan dapat dikaitkan dengan informasi yang berkualitas rendah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Naimi *et al* (2010) mengenai Praktek *Corporate Governance* dan *Audit Report Lag* di Malaysia. Selain meneliti pengaruh ukuran komite Audit dengan *Lag Audit*, Mereka juga menggunakan variabel-variabel Independen seperti, *Audit committe Independence*, *Audit Committee meeting*, *Audit Committee financial expertise*, *Board size*, *Board Independence*, *CEO duality*, dan variabel kontrol seperti, *audit firm quality*, *busy period*, *client complexity*, *client bussiness risk*, dan *client size*.

Mengingat pentingnya ketepatan waktu audit kepada investor, identifikasi terhadap faktor-faktor penentu *Audit Lag* menarik perhatian beberapa peneliti. Seperti yang digambarkan oleh Afify (2009) menunjukkan bahwa komite audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu audit. Sedangkan, menurut Bedard dan Gendron (2010) dalam kajian komperhensif dari literatur audit dan pelaporan keuangan menunjukkan bahwa hubungan antara komite audit dengan ketepatan

waktu pelaporan keuangan jarang diselidiki. Peneliti ini berusaha menelaah lebih dalam mengenai hubungan antara ukuran komite audit dengan *Audit Lag*.

Salah satu tanggung jawab utama komite audit adalah untuk mengawasi proses pelaporan keuangan hingga memastikan ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan (Bursa Malaysia Corporate Governance Guide, 2009). Komite Audit merupakan salah satu komponen *Good Corporate Governance* yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan (Wijaya, 2012). Komite Audit bertugas memantau dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Mengingat bahwa komite Audit didasarkan oleh “*best practices*” diharapkan dapat menjadi faktor penguat dalam sistem pelaporan keuangan, penelitian ini mencoba untuk menyajikan bukti empiris hubungan antara karakteristik komite audit dengan *Audit Lag*. Selain komite Audit, juga diselidiki apakah Proporsi Anggota Komite Audit yang Independen memiliki pengaruh terhadap *Audit Lag*. Menurut Kirk, (2000) dalam Naimi (2010) Komite Audit berperan dalam memberikan ulasan objektif mengenai informasi keuangan dan komite audit independen dapat berkontribusi terhadap kualitas plaporan keuangan.

Komite Audit Independen diharapkan mampu mengurangi *Audit Lag* yang terjadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Naimi, *et al* (2010) adalah lingkungan penelitian sebelumnya dilakukan di Malaysia, kali ini penelitian dilakukan di Indonesia. Perbedaan selanjutnya yaitu peneliti tidak menggunakan variable Independen “*CEO Duality*”. Alasannya adalah adanya perbedaan sitem yang digunakan Malaysia dan Indonesia. Malaysia menggunakan *one tier system* dimana pengawas perusahaan disebut *board* dan pengurus perusahaan disebut *key executives*. OECD (2006) menyatakan dalam *one tier system* hanya terdapat satu dewan (*board*) yang terdiri dari direktur eksekutif dan non-eksekutif. Pada sistem ini, tidak ada perbedaan posisi pada direktur yang duduk dalam komite pengendalian manajemen dan direktur lain. Indonesia menggunakan *two tier system* dimana pengawasan perusahaan dilakukan oleh *Board of Commisioner* dan pengurusan perusahaan dilakukan oleh *Directors*. Pada sistem *two tier* dalam susunan dewan terdapat Dewan Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*). Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam kerangka tata kelola perusahaan, sebab Dewan Direksi sebagai pihak eksekutif bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kinerja Dewan Direksi dan kebijakan yang dibuatnya. Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul sebagai berikut : **“ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT REPORT LAG”**

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan perusahaan dibuat dengan tujuan memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan pengguna laporan keuangan dapat menilai informasi yang disajikan sebagai dasar membuat keputusan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Namun demikian, dalam SPAP terdapat standar yang mengatur mengenai prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan. Prosedur ini mengatur hal-hal seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Oleh sebab itu seorang auditor membutuhkan waktu yang tidak singkat agar informasi keuangan yang disampaikan akurat, relevan serta dapat diandalkan. Dalam peraturan BAPEPAM No. X.K.2., lampiran keputusan ketua BAPEPAM Nomor: Kep/346/BL/2011 mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, tertulis bahwa diwajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Penelitian sebelumnya seperti, Henderson dan Kaplan (2000) yang fokus pada “lag” di sektor perbankan, Ahmad dan Kamarudin (2002) yang menyatakan bahwa “lag” audit yg lama terjadi di perusahaan yg mengalami kerugian, serta Wijaya (2012) yang membuktikan bahwa jumlah anggota komite audit dan kompetensi anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit*

report lag. Dari hasil uraian tersebut peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap *audit report lag* perusahaan, karena dalam mencapai sebuah praktek *good corporate governance*, perusahaan harus mampu memenuhi prinsip *good corporate governance*. Dengan demikian panjang-pendeknya *audit report lag* yang terjadi perlu diperhatikan dalam mewujudkan *good corporate governance*. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah jumlah Anggota komite Audit mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
2. Apakah Independensi Komite Audit mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
3. Apakah jumlah pertemuan komite Audit mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
4. Apakah kompetensi anggota komite audit mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
5. Apakah ukuran Dewan mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
6. Apakah Komisaris Independen mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara mekanisme *Corporate Governance* yaitu, Jumlah Anggota Komite Audit,

Proporsi Anggota komite Audit Independen, Jumlah Pertemuan Komite Audit, kompetensi anggota komite audit, Jumlah ukuran Dewan, dan Proporsi Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pengaruh mekanisme *Corporate Governance* yang dapat berpengaruh terhadap *audit report lag*.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan peran *Corporate Governance* dalam mengurangi *audit report lag*.
3. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat sebagai masukan sekaligus acuan dalam mencermati pelaksanaan penyusunan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas sehingga dapat mengurangi *audit report lag*.
4. Bagi penelitian mendatang, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang mengenai peran mekanisme *Corporate Governance* dan pengaruhnya dalam mengurangi *audit report lag*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka sebagai dasar penelitian yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, pemilihan sampel, data yang diperlukan, sumber pengumpulan data, metode analisis, pengolahan data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai simpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan adanya hubungan kontrak antara agen (manajemen) dengan pemilik (*principal*). Dalam hal ini hubungan ke agenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih yang memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen and Meckling, 1976). *Agent* memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan dibandingkan *principal*. Ketimpangan informasi ini biasa disebut sebagai asimetri informasi (Jensen dan Meckling, 1976).

Asimetri informasi adalah ketidaksinambungan informasi yang dimiliki *principal* dan *agent*, ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen sebaliknya, *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan (Widyaningdyah, 2001 dalam Wijaya, 2012). Adanya asimetri informasi menyebabkan timbulnya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* yang disebut dengan *agency problem*.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa terdapat dua macam *agency problem*, yaitu :

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agensi, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku (Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan BAPEPAM mengenai Corporate Governance, 2006)

Jadi, teori agensi ini yang mendasari praktek *corporate governance*. Dengan adanya praktek *corporate governance* ini diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen yang dapat mengakibatkan *audit report lag*.

2.1.2 Corporate Governance

Di era globalisasi pasar modal, ketergantungan perusahaan publik terhadap modal eksternal (*equity* maupun *loans*) untuk pendanaan aktivitas operasi perusahaan, aktivitas investasi maupun aktivitas ekspansi perusahaan semakin meningkat. (Anyta, 2011), oleh sebab itu, meyakinkan para pemberi modal eksternal (*investors*) bahwa dana yang telah mereka investasikan akan digunakan untuk mendanai aktivitas perusahaan dengan cara yang paling tepat dan efisien menjadi fokus perhatian perusahaan. Disisi Investor, adanya kepastian akan

tingkat pengembalian investasi (*investment yield*) yang menguntungkan menjadi faktor utama pertimbangan investor.

Kepastian semacam itu dapat dihasilkan melalui sistem *corporate governance*. *Corporate Governance (CG)* seperti didefinisikan oleh Cadbury Committee (dikutip dari Arifin, 2005) merupakan:

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.”

(Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka)

Untuk mencapai kinerja yang baik dan terhindar dari masalah *audit report lag* yang berkepanjangan, suatu perusahaan harus memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Komite Nasional Corporate Governance (2006) terdiri dari:

1. Keadilan (*fairness*), yaitu menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. Transparansi (*transparency*), yaitu mewajibkan adanya suatu sistem informasi terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
5. Independensi (*independency*), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

2.1.2.1 Komite Audit

Dewan perusahaan bertanggung jawab untuk memantau kualitas informasi yang terdapat dalam pelaporan keuangan yang disampaikan kepada publik. Dalam The Bursa Malaysia Corporate Governance Guide (2009) (dalam Naimi, 2010) menegaskan bahwa :

The board is required by law to ensure that the financial statements of the company represent a true and fair view of the state of affairs of the company and that they are prepared in accordance with applicable approved accounting standards to assist in discharging the board's fiduciary duties, the responsibilities for overseeing the financial reporting process is often delegated to the audit committee.

(Dewan diperlukan oleh hukum untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mewakili pandangan yang benar dan adil dari bagian urusan perusahaan dan laporan keuangan tersebut telah disediakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Untuk membantu dalam menjalankan tugas , tanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan sering didelegasikan kepada komite Audit)

Peraturan mengenai Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan

Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Bursa. Dalam bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di BEJ (sekarang bernama BEI) wajib memiliki Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. Jumlah Komisaris Independen proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris. Di dalam peraturan ini juga menyebutkan bahwa Komisaris Independen sekaligus menjabat sebagai ketua Komite Audit.

Di Indonesia melihat betapa pentingnya keberadaan Komite Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka serangkaian mengenai ketentuan Komite Audit telah diterbitkan dalam Wijaya (2012), antara lain sebagai berikut:

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit.
- b. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan public memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbarui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.
- d. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

2.1.2.1.1 Ukuran Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit diatur dalam surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 dan Peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 Desember 2004 bagian C yaitu anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. Di Indonesia, keanggotaan komite Audit beragam, disesuaikan dengan ukuran/ besar-kecilnya organisasi serta tanggung jawabnya. Namun, jumlah keanggotaan tiga sampai lima merupakan jumlah yang cukup ideal (Wijaya, 2012).

Keberagaman jumlah anggota Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini yang menimbulkan persepsi bahwa semakin banyak anggota Komite Audit dapat lebih cepat dalam menemukan serta menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat mengurangi *Audit Report Lag*. Menurut Naimi (2010) bahwa semakin besar ukuran Komite Audit maka akan semakin meningkatkan kualitas pengawasan.

2.1.2.1.2 Independensi Komite Audit

Salah satu tujuan dari komite audit adalah untuk memberikan ulasan objektif tentang informasi keuangan, dan Komite Audit Independen dapat berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan (Kirk, 2000). Perusahaan-perusahaan yang memiliki insentif serta kemampuan untuk meningkatkan komite Audit dengan cara memiliki Komite Audit Independen lebih banyak dari jumlah yang disyaratkan oleh undang-undang (Beasley dan Salterio, 2001).

Di Indonesia, untuk menjamin Independensi Komite Audit, BAPEPAM (2004) menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit, yaitu:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa Audit, jasa non Audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris Independen.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajin mengalihkan kepada pihak lain.

4. Tidak mempunyai :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara rasional maupun secara vertical dengan komisaris
- b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

2.1.2.1.3 Rapat Komite Audit

Pertemuan Komite Audit adalah tempat bagi direksi untuk membahas proses pelaporan keuangan dan disitulah terjadi proses pemantauan pelaporan keuangan terjadi. Sebuah Komite Audit Independen tidak mungkin efektif kecuali jika keseluruhan anggota komitenya aktif (Menon dan William, 1994). *The National Committee on Fraudulent Financial reporting*, atau biasa dikenal dengan *Treadway Comission* (1987), menyatakan bahwa Komite Audit yang ingin berperan penting dalam pengawasan perlu untuk mempertahankan tingkat aktivitas pertemuan yang tinggi. Salah satu cara untuk mengukur ketekunan Komite Audit adalah dengan mempertimbangkan jumlah pertemuan yang diadakan. Pertemuan Komite Audit dilakukan secara periodik ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga samapai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002 dalam Wijaya, 2012).

Adanya pertemuan yang sering dilakukan oleh Komite Audit akan membuat pembaharuan dalam informasi dan pengetahuan isu-isu akuntansi atau audit dan

dapat segera mengarahkan sumberdaya internal dan eksternal untuk mengatasi masalah secara tepat waktu (Abbot *et al*, 2004). Jika komite Audit menemui masalah yang dihadapi dalam proses laporan keuangan, dan frekuensi pertemuan komite audit rendah maka, masalah tidak dapat diperbaiki atau diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, diharapkan adanya frekuensi pertemuan komite Audit yang tinggi dapat memperpendek *Audit Report Lag*.

2.1.2.1.4 Kompetensi: Keahlian Keuangan Anggota Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab untuk tugas-tugas yang memerlukan keahlian khusus di bidang akuntansi, mampu menganalisis masalah, serta memahami sistem yang berlaku dalam perusahaan. Felo dan Solieri (2009) mengklasifikasikan anggota komite audit yang memiliki pengalaman dibidang keuangan dan akuntansi, memiliki sertifikasi akuntansi atau pengalaman pengawasan lainnya dikategorikan sebagai Komite Audit yang lebih ahli karena memiliki latar belakang keuangan yang lebih kuat (berpengalaman).

Berdasarkan Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Berdasarkan pedoman *corporate governance*, anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan ketrampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan (dalam Wijaya, 2012). Dengan demikian muncul persepsi bahwa anggota komite audit yang memiliki keahlian dibidang Akuntansi dan Keuangan lebih mungkin untuk

mencegah dan mendeteksi salah saji material, sehingga dapat memperpendek *Audit report Lag*.

2.1.3 Ukuran Dewan

Salah satu kelemahan yang terkait dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang banyak adalah masalah komunikasi atau koordinasi, yang membuat kurang efisien serta sulit dalam memonitor, dibandingkan dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota lebih sedikit, (Dimitropoulos dan Asteriou, 2010) dalam Naimi, (2010) berpendapat bahwa ukuran dewan yang memiliki anggota besar menyebabkan kurang terciptanya partisipasi, kurang terorganisir serta sulit dalam mencapai suatu kesepakatan. Ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit atau kecil, dianggap akan lebih mudah dalam birokrasi, lebih fungsional sehingga lebih mampu dalam memberikan pengawasan saat proses pelaporan keuangan (Xie *et al*, 2003).

Didukung dengan prinsip *good corporate governance*, diharapkan dengan jumlah anggota dewan yang kecil suatu koordinasi dan penyampaian informasi dapat lebih efisien sehingga mampu memperpendek *Audit Report Lag*.

2.1.4 Komisaris Independen

Direktur non-eksekutif yang Independen dengan ketrampilan yang tepat, tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian Independen atau kemampuan bertindak dalam kepentingan terbaik pemegang saham dipandang lebih baik dalam memonitor manajemen dibandingkan apabila direktur tersebut dari dalam direksi (Naimi, 2010). Dewan Independen diyakini dapat melindungi kepentingan seluruh pemegang saham

(Duchin, *et al* 2010). Fama dan Jensen (2003) (dalam Naimi, 2010) berpendapat bahwa anggota dewan yang berasal dari luar memiliki insentif untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan tidak berkolusi dengan para manajer untuk menipu pemegang saham karena, "*there is substantial devaluation of human capital when internal controls break down*"(p.35). Bukti Empiris di Amerika Serikat, Inggris Yunani, Italia, Cina, Korea, dan Singapura, umumnya mendukung peran pengawasan positif dewan independen. Studi menunjukkan bahwa masuknya direktur independen atau diluar dewan direksi meningkatkan kualitas pengungkapan (Naimi, 2010).

Di Indonesia, dalam struktur kepengurusan perusahaan selalu ada posisi Direksi dan Komisaris. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sedangkan pasal 108 ayat (1) mengatakan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Dalam pedoman umum GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) disebutkan bahwa Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang Terafiliasi. Yang dimaksud dengan "terafiliasi" adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain,

serta dengan perusahaan itu sendiri. Disebutkan juga bahwa jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang:

- (i) Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
- (ii) Bukan merupakan orang yang bekerja pada emiten dan perusahaan publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir;
- (iii) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
- (iv) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
- (v) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, dan
- (vi) Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Adanya keberadaan Komisaris Independen ini, karena tidak terafiliasi dengan pendiri atau pemegang saham mayoritas, diharapkan bisa mewakili kepentingan

pemegang saham publik. Dengan begitu, kepentingan investor saham sebagai pemegang saham publik lebih terjamin

Dari uraian tersebut, peneliti ingin meneliti pengaruh proporsi dewan independen terhadap panjang-pendeknya *audit report lag* di Indonesia. Amirudin, 2004 (dalam Fachrudin, 2008) menjelaskan, sejak Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, maka *corporate governance* menjadi bagian untuk pembenahan pengelolaan korporasi. Dewan yang aktif, berwawasan luas, dan independen sangat diperlukan untuk memastikan standar tata kelola perusahaan yang terbaik (Barton dan Wong, 2006).

2.1.5 Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang (Kieso dan Weygandt, 2011). Dalam Pesyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (satu), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, dalam PSAK No.1 Paragraf 10 juga menyebutkan bahwa, Informasi lain tetap disajikan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh standar akuntansi. Laporan Keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan manajemen kepada pihak luar perusahaan. Untuk itu, agar penyampaian informasi dari manajemen terhapap pihak luar perusahaan berkualitas, PSAK menyatakan beberapa karakteristik kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.

3. Andal

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*representation faithfulness*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat menandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Pada tanggal 5 Juli 2011 Bapepam mengeluarkan peraturan Nomor X.K.2, Lampiran keputusan ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 Mengenai Kewajiban Penyampaian Keuangan Berkala, laporan keuangan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran keputusan ketua Bapepam Nomor: Kep/346/BL/2011 disebutkan bahwa laporan keuangan yang harus disampaikan kepada Bapepam terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan (neraca)
2. Laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika emiten atau perusahaan publik menerapkan satu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan
6. Catatan atas laporan keuangan.

2.1.6 Audit dan Standar Auditing

Pengertian Auditing yang diungkapkan oleh Arens, *et al* (2006) yaitu :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person”

(Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan orang yang kompeten dan independen)

Audit pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:

1. Audit laporan keuangan (*Financial Statement Audit*), adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Auditor Independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*), adalah audit yang tujuannya menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak berwenang pembuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai di pemerintahan.
3. Audit Operasional (*Operational Audit*), merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, seorang auditor memiliki pedoman yang dinamakan standar auditing. Standar Auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Standar Umum, yaitu:

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya yang cermat.
- b. Standar Pekerjaan Lapangan, yaitu:
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten dalam pelaksanaan audit harus disupervisi dengan semestinya.
 2. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian saat dilakukan.
 3. Bukti audit dikatakan kompeten jika diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- c. Standar Pelaporan, yaitu:
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak-konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan. Dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi.

Adanya standar yang telah ditetapkan dan wajib dipenuhi membuat auditor harus lebih teliti dan berhati-hati sehingga auditor membutuhkan waktu yang cukup untuk memenuhi standar-standar tersebut. Namun demikian, salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan. Kondisi seperti ini menimbulkan dilemma bagi auditor, karena seorang auditor harus mampu menyajikan laporan keuangan auditan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas hasil laporan keuangan auditan. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada Bapepam tergantung dari lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Semakin cepat pekerjaan Audit selesai maka semakin cepat pula informasi di publikasikan (Wijaya, 2012).

Laporan keuangan perusahaan dibuat dengan tujuan memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan para pengguna laporan keuangan dapat menilai informasi yang disajikan sebagai dasar membuat keputusan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Dalam Laporan Keuangan terdapat ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Untuk memenuhi tujuannya diperlukan keseimbangan antara

relevan dan keandalan kebutuhan pengambilan keputusan yang merupakan pertimbangan menentukan (IAI, 2001 dalam Wijaya, 2012).

Dyer dan McHugh, 1974 menyimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Para pemakai informasi akuntansi tidak hanya perlu memiliki informasi keuangan yang relevan dengan prediksi dan Pembuatan keputusan, tetapi informasi juga harus bersifat baru. Ketepatan waktu mengimplikasi bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan (Wijaya, 2012).

2.1.7 Audit Report Lag

Proses untuk menyediakan informasi akuntansi ke public memberikan nilai informasi dari laporan keuangan audit yang akan ditentukan oleh *audit report lag*. Menurut Kechel dan Payne (2001), dalam Subekti (2005), *audit report lag* adalah periode waktu antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan. Dalam meningkatkan pengurangan *reporting lag* harus memperhatikan isi informasi dan relevansi informasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi *timing of earnings announcement* berkaitan dengan *audit delay* (Givoly dan Palmon; 1982).

Dyer dan McHugh (1975) membagi keterlambatan atau *lag* menjadi tiga, yaitu:

1. *Preliminary lag*, adalah interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahuluan oleh pasar modal.
2. *Auditor's signature lag*, adalah interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal tercantum dalam laporan auditor.
3. *Total lag*, adalah interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Henderson dan Kaplan (2000) fokus pada “lag” pemeriksaan di sektor perbankan dan hasilnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mengeluarkan laporan audit karena beroperasi dalam industri yang sangat teratur.

Ahmad dan Kamarudin (2002) peneliti dari Malaysia, menggunakan sampel 100 perusahaan public yang terdaftar di *Kuala Lumpur Stock Exchange* dengan tahun fiskal 1996-2000. Hasil penelitian menyatakan bahwa audit report lag yang lebih lama terjadi pada perusahaan: (1) Industri nonfinansial, (2) mendapat opini audit selain *unqualified opinion*, (3) memiliki tahun fiskal yang berakhir selain 31 Desember, (4) diaudit oleh KAP *non Big Five*, (5) mengalami kerugian, (6) memiliki resiko yang lebih tinggi. Resiko diprosikan deng proporsi total utang dengan total aset. Sedangkan adanya pos-pos luar biasa dan ukuran perusahaan tidak terbukti berhubungan secara signifikan dengan *audit report lag*.

Subekti (2005), menguji empiris *audit report lag* menggunakan *client cycle time* dan *firm cycle time*. Secara parsial hanya hanya *client size*, *loss* dan segmen geografis yang berpengaruh secara signifikan terhadap *client cycle time* sedangkan ukuran kantor akuntan publik, *going concern opinion*, dan jenis perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *client cycle time*. Secara parsial hanya hanya *client size*, *loss*, *going concern opinion*, dan segmen geografis yang berpengaruh secara signifikan terhadap *firm cycle time* sedangkan ukuran kantor akuntan publik, dan jenis industri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ukuran perusahaan.

Sejati (2007), menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Audit delay pada perusahaan go publik di BEJ tahun 2003-2005, hasilnya klasifikasi industri, laba/rugi usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap, sedangkan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*.

Setyorini (2008), menganalisis faktor-faktor *audit delay* pada perusahaan publik di Indonesia, hasilnya ukuran perusahaan dan jenis Industri tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan ukuran KAP, jenis opini auditor, dan jenis industri berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Naimi (2010), meneliti tentang hubungan dari corporate governance dengan *audit report lag* pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2002, *Audit committee size* dan *Audit committee meeting* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan *Audit committee independence* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Hashim dan Rahman (2011) meneliti tentang komite audit dengan audit report lag pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2007-2009, penelitian ini menyatakan *Audit report lag* hanya dipengaruhi oleh variabel *Audit committee independence* dan *Audit committee expertise*, sedangkan variabel *Audit committee meeting* tidak berpengaruh terhadap *Audit report lag*.

Wijaya (2012), meneliti pengaruh karakteristik komite Audit terhadap *audit report lag*, pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Penelitian ini menyatakan bahwa, Karakteristik komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* adalah jumlah anggota komite audit dan kompetensi anggota, sedangkan Independensi komite audit serta Rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Henderson dan Kaplan (2000)	<i>An Examination of Audit report Lag for Banks: A panel data approach</i>	a. ukuran perusahaan b. jenis industry c. laba/rugi d. pos-pos luar biasa e. opini audit f. auditor g. tahun tutup buku h. proporsi utang	Ukuran bank secara negatif berhubungan dengan <i>audit report lag</i> dalam cross sectional analysis
2.	Ahmad dan Kamarudin (2002)	<i>Audit Report Lag and The Timeliness of Corporate Reporting: Malaysian Evidence</i>	a. ukuran perusahaan b. jenis industry c. laba/rugi d. pos-pos luar biasa e. opini audit f. auditor g. tahun tutup buku h. proporsi utang	a. industri finansial, auditor dan tahun tutup buku berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> . b. Kerugian, opini selain <i>unqualified opinion</i> , proporsi utang yang diprosikan dengan rasio total utang terhadap total asset berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> . c. Ukuran perusahaan dan pos-pos luar biasa yang dilaporkan perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> .
3.	Hamzah Ahmad, M. Nasrul Alim, dan Imam Subekti (2005)	<i>Pengujian Empiris Audit Report Lag menggunakan CLIENT CYCLE dan FIRM CYCLE TIME</i>	a. ukuran perusahaan b. ukuran KAP c. Laba/rugi yang dilaporkan klien d. <i>Going concern opinion</i> e. Jumlah segmen	<i>client size, loss</i> dan segmen geografis yang berpengaruh secara signifikan terhadap <i>client cycle time</i> sedangkan ukuran kantor akuntan publik, <i>going concern opinion</i> , dan jenis perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>client cycle time</i> . <i>client size, loss, going concern opinion</i> , dan segmen geografis yang berpengaruh secara signifikan terhadap <i>firm cycle time</i> sedangkan ukuran

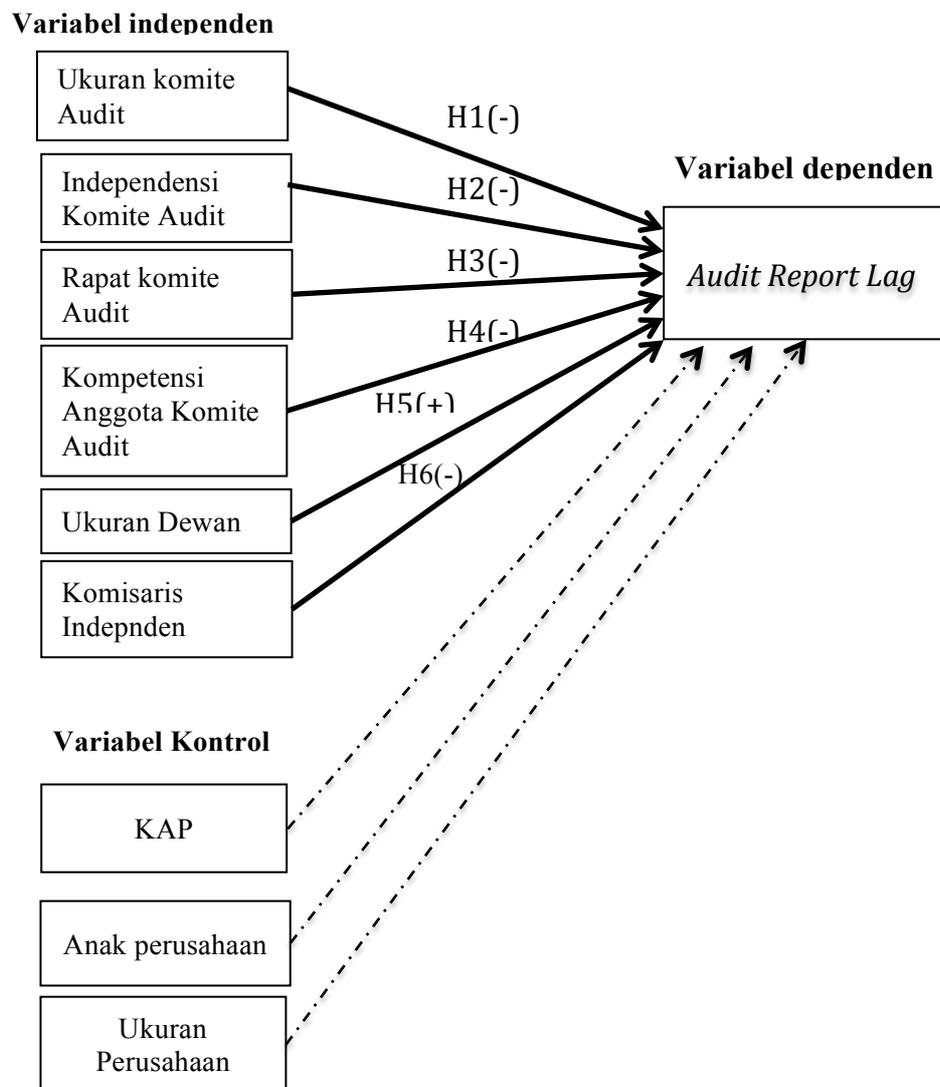
			geografis perusahaan f. Jenis Industri	kantor akuntan publik, dan jenis industri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ukuran perusahaan.
4.	Anggit Wasis Sejati (2007)	<i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta Tahun 2003-2005</i>	a.ukuran perusahaan b.Klasifikasi Industri c.Laba/Rugi Perusahaan	klasifikasi industri, laba/rugi usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap, sedangkan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>audit delay</i> .
5.	Indah Setyorini (2008)	<i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lamanya Penyelesaian Audit (Audit Delay) Pada Perusahaan Publik Di Indonesia</i>	a.ukuran perusahaan b.ukuran KAP c.Jenis Opini Auditor d.Laba/Rugi usaha e.Jenis Industri	ukuran perusahaan dan jenis Industri tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan ukuran KAP, jenis opini auditor, dan jenis industri berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> .
6.	M. Naimi, Shafie dan Hussin (2010)	<i>Corporate Governance and Audit report lag in Malaysia</i>	a.Audit committee size b.Audit committee independen c.Audit committee meeting d.Audit committee financial expertise e.Board size f.Board independen g.CEO duality	a. Audit committee size berpengaruh negatif terhadap audit report lag b. Audit committee independence tidak berpengaruh terhadap audit report lag c. Audit committee meeting berpengaruh negatif terhadap audit report lag.

7.	Hashim dan Rahman (2011)	<i>Audit report lag and the Effectiveness of Audit Committee Among Malaysian Listed Companies</i>	a. Audit committee independenb. Audit committee meeting c. Audit committee expertise d. Company size e. Type of audit firm f. Profitability	Audit report lag hanya dipengaruhi oleh variabel Audit committee independence dan Audit committee expertise, sedangkan variabel Audit committee meeting tidak berpengaruh terhadap audit report lag.
8.	Aditya Taruna Wijaya (2012)	<i>Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Audit Report Lag</i>	a. Independensi komite audit b. Rapat komite Audit c. Kompetensi anggota Komite Audit d. Jumlah anggota komite Audit	Karakteristik komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> adalah jumlah anggota komite audit dan kompetensi anggota, sedangkan Independensi komite audit serta Rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan.

2.3 Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi audit report lag. Faktor-faktor tersebut antara lain Ukuran Komite Audit, Independensi komite Audit, Rapat komite Audit, Kompetensi Anggota Komite Audit, Ukuran dewan, Independensi Dewan, kerangka pemikiran dijelaskan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report lag*

Peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 Desember 2004 bagian C yaitu anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. Di Indonesia, keanggotaan komite

Audit beragam, disesuaikan dengan ukuran/ besar-kecilnya organisasi serta tanggung jawabnya. Namun, jumlah keanggotaan tiga sampai lima merupakan jumlah yang cukup ideal (Wijaya, 2012).

Keberagaman jumlah anggota Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini yang menimbulkan persepsi bahwa semakin banyak anggota Komite Audit dapat lebih cepat dalam menemukan serta menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat mengurangi *Audit Report Lag*. Menurut Naimi (2010), bahwa semakin besar ukuran Komite Audit maka akan semakin meningkatkan kualitas pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit Report Lag*.

2.4.2 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Audit report lag*

Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep- 29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal anggota komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Menurut Kirk, (2000) dalam Naimi, (2010) Salah satu tujuan dari komite audit adalah untuk memberikan ulasan objektif tentang informasi keuangan, dan Komite Audit Independen dapat berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki insentif serta kemampuan untuk meningkatkan komite Audit dengan cara memiliki Komite Audit Independen lebih banyak dari jumlah yang disyaratkan oleh undang-undang (Beasley dan Salterio, 2001). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Independensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit report lag*.

2.4.3 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Audit report lag

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan komite audit melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (FCGI, 2002).

Adanya pertemuan yang sering dilakukan oleh Komite Audit akan membuat pembaharuan dalam informasi dan pengetahuan isu-isu akuntansi atau audit dan dapat segera mengarahkan sumberdaya internal dan eksternal untuk mengatasi masalah secara tepat waktu (Abbot *et al*, 2004). Jika komite Audit menemui masalah yang dihadapi dalam proses laporan keuangan, dan frekuensi pertemuan komite audit rendah maka, masalah tidak dapat diperbaiki atau

diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, diharapkan adanya frekuensi pertemuan komite Audit yang tinggi dapat memperpendek *Audit Report Lag*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Rapat Komite Audit Berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*

2.4.4 Pengaruh Kompetensi: Keahlian Keuangan Anggota Komite Audit terhadap Audit report lag

Berdasarkan Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Berdasarkan pedoman corporate governance, anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan ketrampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan (dalam Wijaya, 2012). Dengan demikian muncul persepsi bahwa anggota komite audit yang memiliki keahlian dibidang Akuntansi dan Keuangan lebih mungkin untuk mencegah dan mendeteksi salah saji material, sehingga dapat memperpendek *Audit report Lag*, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kompetensi Anggota Komite Audit berpengaruh Negatif terhadap *Audit Report Lag*

2.4.5 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Audit report lag

Salah satu kelemahan yang terkait dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang banyak adalah masalah komunikasi atau koordinasi, yang

membuat kurang efisien serta sulit dalam memonitor dibandingkan dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota lebih sedikit (Dimitropoulos dan Asteriou, 2010). Mark dan Li (2001), berpendapat bahwa ukuran dewan yang memiliki anggota besar menyebabkan kurang terciptanya partisipasi, kurang terorganisir serta sulit dalam mencapai suatu kesepakatan. Ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit atau kecil, dianggap akan lebih mudah dalam birokrasi, lebih fungsional sehingga lebih mampu dalam memberikan pengawasan saat proses pelaporan keuangan (Xie *et al*, 2003). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ke lima yaitu:

H5: Ukuran Dewan berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*

2.4.6 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Audit report lag*

Direktur non-eksekutif yang Independen dengan ketrampilan yang tepat, tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian Independen atau kemampuan bertindak dalam kepentingan terbaik pemegang saham dipandang lebih baik dalam memonitor manajemen dibandingkan apabila direktur tersebut dari dalam direksi (Naimi, 2010). Dewan Independen diyakini dapat melindungi kepentingan seluruh pemegang saham (Duchin, 2010). Fama dan Jensen (2003) (dalam Naimi, 2010) berpendapat bahwa anggota dewan yang berasal dari luar memiliki insentif untuk melaksanakan tugas-tugas merekadan tidak berkolusi dengan para manajer untuk menipu pemegang saham karena, “*there is substantial devaluation of human capital when internal controls break down*”(p.35). Bukti Empiris di Amerika Serikat, Inggris Yunani, Italia, Cina, Korea, dan Singapura, umumnya mendukung peran pengawasan positif dewan independen. Studi menunjukkan bahwa masuknya

direktur independen atau diluar dewan direksi meningkatkan kualitas pengungkapan (Naimi, 2010).

Dari uraian tersebut, peneliti ingin meneliti pengaruh proporsi dewan independen terhadap pajang-pendeknya *audit report lag* di Indonesia. Amirudin, 2004 (dalam Fachrudin, 2008) menjelaskan, sejak Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, maka *corporate governance* menjadi bagian untuk pembenahan pengelolaan korporasi. Dewan yang aktif, berwawasan luas, dan independen sangat diperlukan untuk memastikan standar tata kelola perusahaan yang terbaik (Barton dan Wong, 2006). Sehingga, dapat dirumuskan hipotesis terakhir dari penelitian ini yaitu:

H6: Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit Report Lag*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan dan membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2003). Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Sekaran, 2003). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit report lag* suatu perusahaan. Variabel *audit report lag* dilambangkan dalam variabel AUD_LAG.

Pengertian *audit report lag* itu sendiri adalah jumlah hari antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan. Selain yang tersebut di atas, *audit report lag* dapat juga diartikan sebagai lamanya waktu penyelesaian yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Variabel *audit report lag* diukur secara kuantitatif jumlah hari antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang membantu menjelaskan varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2003). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, independensi komite

audit, rapat komite audit, kompetensi komite audit, ukuran dewan, independensi dewan.

3.1.2.1 Ukuran Komite Audit

Berdasarkan surat edaran dari dikreksi PT. Bursa Efek Indonesia No.SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 serta pedoman pembentukan komite audit menurut BAPEPAM perihal keanggotaan komite audit, disebutkan anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Variabel ini diukur dari jumlah anggota komite audit yang ada dalam satu perusahaan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ukuran Komite Audit ini dilambangkan dalam ACSIZE.

3.1.2.2 Independensi Komite Audit

Salah satu tujuan dari komite audit adalah untuk memberikan ulasan objektif tentang informasi keuangan, dan Komite Audit Independen dapat berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan (Kirk, 2000). Perusahaan-perusahaan yang memiliki insentif serta kemampuan untuk meningkatkan komite Audit dengan cara memiliki Komite Audit Independen lebih banyak dari jumlah yang disyaratkan oleh undang-undang (Beasle dan Salterio, 2001). Variabel ini diukur dari proporsi anggota komite audit non-komisaris independen dengan seluruh anggota komite audit. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel Independensi Komite Audit dilambangkan dalam ACIND.

3.1.2.3 Rapat Komite Audit

Komite audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman Komite Audit oleh Bapepam menyebutkan bahwa komite audit wajib

mengadakan pertemuan minimal sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun untuk mendiskusikan pelaporan keuangan dengan auditor eksternal (Wijaya, 2012). Variabel ini diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu 0 untuk jika Rapat dilaksanakan empat kali atau lebih dalam setahun 1 jika lainnya. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan ACMEET4.

3.1.2.4 Kompetensi: Keahlian Keuangan Anggota Komite Audit

Berdasarkan Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan ketrampilan, pengalaman, serta latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan atau setidaknya satu anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. Variabel ini diukur dari proporsi anggota Komite Audit yang kompeten dengan jumlah anggota Komite Audit. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan ACEXP.

3.1.2.5 Ukuran Dewan

Salah satu kelemahan yang terkait dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang banyak adalah masalah komunikasi atau koordinasi, yang membuat kurang efisien serta sulit dalam memonitor dibandingkan dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota lebih sedikit (Dimitropoulos dan Asteriou, 2010). Mark dan Li (2001) berpendapat bahwa ukuran dewan yang memiliki

anggota besar menyebabkan kurang terciptanya partisipasi, kurang terorganisir serta sulit dalam mencapai suatu kesepakatan. Ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit atau kecil, dianggap akan lebih mudah dalam birokrasi, lebih fungsional sehingga lebih mampu dalam memberikan pengawasan saat proses pelaporan keuangan (Xie *et al*, 2003). Cara mengukur variabel ini dengan menghitung jumlah anggota dewan yang ada dalam suatu perusahaan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan BSIZE.

3.1.2.6 Komisaris Independen

Independensi dewan diharapkan dapat diperoleh dengan hadirnya komisaris independen. Menurut Matsusaka dan Ozbas (2010), adanya komisaris independen diyakini dapat melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Cara mengukur variabel ini adalah dengan melihat proporsi jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan variabel BIND.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, karena variabel ini diduga ikut berpengaruh terhadap variabel independen. Penelitian ini menggunakan tiga variabel control untuk mengontrol faktor-faktor lain yang mempengaruhi panjang-pendeknya *audit report lag*. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; *Audit firm quality* (KAP), *Client complexity*, ukuran perusahaan.

3.1.3.1 Audit Firm Quality (KAP)

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Internasional diharapkan memiliki jangka audit report lag lebih pendek, karena perusahaan tersebut di audit oleh auditor berpengalaman dan berkompotensi baik (Naimi *et al*, 2010). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh *BIG four*, dan 0 jika sebaliknya. Variabel ini dilambangkan dengan *BIG4*.

3.1.3.3 Client Complexity

Jumlah anak perusahaan merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kompleksitas perusahaan, sehingga variabel ini diukur dengan *square root* (akar pangkat) jumlah dari anak perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan *SUBS*.

3.1.3.5 Ukuran Perusahaan

Ashton *et al* (1989), dalam Naimi *et al* (2010) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar dapat memilih untuk menerapkan kontrol internal yang kuat, yang memungkinkan auditor untuk menempatkan ketergantungan lebih pada tes kepatuhan interim dari pada pengujian substantif saldo akhir tahun, sehingga memfasilitasi penyelesaian audit yang tepat waktu. Variabel ini diukur dengan natural log total asset perusahaan pada saat tutup tahun. Variabel ini dilambangkan *LNSIZE*.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan rangkap yang akan diteliti. Populasi dalam

penelitian ini adalah semua perusahaan non-keuangan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011 yang berjumlah 597 perusahaan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial statement*) pada tahun 2010-2011
2. Bukan merupakan perusahaan keuangan
3. Memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011. Data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan data

empiris dan studi pustaka. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Studi pustaka menggunakan berbagai literatur seperti jurnal, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi jumlah sample, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2011).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah ujinormalitas, uji multikolenieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali,

2011). Untuk mendeteksi normalitas data, dilakukan melalui analisis statistik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_0 = Data residual terdistribusi normal.

H_1 = Data residual tidak terdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut :

- a. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka H_0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara statistik maka H_0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cut-off* yang umum adalah:

1. Jika nilai *Tolerance* > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

2. Jika nilai Tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini heterokedastisitas diuji dengan menggunakan uji Glejser. Untuk mengetahui tidak adanya heteroskedastisitas ditunjukkan dengan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Residual (AbsRes). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5 persen.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

3.5.3 Analisis Regresi

Uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen. Model regresi dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$AUDLAG = \beta_0 + \beta_1 ACSIZE + \beta_2 ACIND + \beta_3 ACMEET + \beta_4 ACEXP + \beta_5 BSIZE + \beta_6 BIND + \beta_7 BIG4 + \beta_8 SUBS + \beta_9 LNsize + \varepsilon$$

dimana:

- β_0 = Konstanta
- AUDLAG = *audit report lag*, diartikan jumlah hari antara tanggal berakhirnya tahun buku dan tanggal laporan audit, dihitung secara kuantitatif per hari
- ACSIZE = jumlah anggota komite audit
- ACIND = proporsi anggota komite audit non-komisaris independen dengan seluruh anggota komite audit
- ACMEET4 = 1, jika rapat komite audit dilakukan minimal 4 kali atau lebih dalam setahun, 0 jika lainnya
- ACEXP = proporsi anggota komite audit yang memiliki keahlian bidang keuangan dan akuntansi dengan jumlah anggota komite audit
- BSIZE = Jumlah anggota dewan
- BIND = proporsi komisaris independen dengan jumlah anggota dewan
- BIG4 = 1, jika Auditor PricewaterhouseCoopers, Ernest and Young, KPMG, atau Deloitte, 0 jika lainnya
- SUBS = *square root* (akar pangkat) jumlah dari anak perusahaan
- LNSIZE = *natural log total asset* perusahaan pada saat tutup tahun

3.5.3.1 Uji Hipotesis Analisis Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka hipotesis diterima. Hal ini berarti model

regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0.05 , maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

3.5.3.2 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Penelitian ini menggunakan nilai adj R^2 karena mampu mengatasi bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi. Nilai Adj R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat sangat terbatas (Ghozali, 2011).

3.5.3.3 Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi $< \alpha$, maka hipotesis diterima. Jika nilai probabilitas signifikansi $> \alpha$, maka hipotesis ditolak.